

Analisis Faktor-Faktor Utama dalam Konsolidasi Demokrasi di Tunisia Pasca Arab Spring (2011-2014)

Dhea Veryna Novemta Simatupang¹
Arya Sandhiyudha²

Abstract

This study discusses about democracy consolidation in Tunisia and the factors that supporting the democracy consolidation in Tunisia post Arab Spring, and that topic are using the paradigm of liberalism through the concept of democratic, and the concept of passive secularism that influence with political culture concept. Arab Spring that occurred in Tunisia successfully overthrew the authoritarian government of Ben Ali, and brought Tunisia into the era of consolidating democracy. In contrast to the conditions of other Arab countries that are still in conflict to get out of the influence the old regime. In Post colonial, Tunisia is a secular state that lives in authoritarian leadership, so the presence of Islamic political actors Ennahda became the Major Tunisians choice at the time. The presence of democracy in Tunisia is evidence of an attempt to consolidate democracy by the post Arab Spring government. Successful democratic values such as the holding of fair elections in 2011, the existence of coalitions with opposition groups, and of course the policy that is not authoritarian. The presence of democratic values in Tunisia is supported by the main factors, based on the paradigm of Liberalism through the issue of democracy with its ideology, then the influence of political culture, and the concept of passive secularism carried by the ennahda party.

Keywords: Arab Spring, Consolidation of Democracy, Ennahda party, Tunisia

Pendahuluan

Arab Spring merupakan peristiwa politik yang kemudian menimbulkan banyak perbincangan dalam dunia politik. Perbincangan yang mengarah kepada apakah demokrasi dapat terwujud di negara kawasan Arab, melihat negara-negara di kawasan Arab memiliki kultur pemerintahan yang otoriter. Negara-negara kawasan Arab lebih dekat dengan sistem

¹ Mahasiswi, Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Budi Luhur, dhevenosi@yahoo.com.

² Dosen, Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Budi Luhur.

pemerintahan yang cenderung monarki. Kondisi tersebut menghasilkan banyak pro kontra terkait keberhasilan demokratisasi di kawasan Arab, namun pada penelitian ini penulis hanya fokus terhadap pandangan yang pro atau optimis. Beberapa peneliti seperti Julie Chernov Hwang (Hwang, 2009:12), Tariq Ramadhan (Ramadan, 2012: 143), dan Isabel Schafer (Schäfer, 2014:6) memberikan pendapat bahwa demokratisasi adalah mungkin terjadi di kawasan Arab. Pandangan optimis tersebut didukung dengan peristiwa keberhasilan Arab Spring yang terjadi di negara Tunisia.

Arab Spring atau Musim Semi, rakyat Arab menyebut peristiwa politik penting ini *al-Tsaurat al-Arabiyyah*, diartikan sebagai revolusi yang akan mengubah sistem otoriter yang sekian lama dipimpin dengan kekuasaan yang tidak dibatasi menjadi negara yang lebih ideal. Ideal dalam arti lebih demokrasi. Orang barat menyebutnya dengan istilah *Arab Spring* yaitu musim/momentum yang menjadi awal pertumbuhan demokrasi di negara-negara Arab. Arab Spring ini mulai terasa gejolaknya sejak Januari 2011 di Tunisia (Sahide, 2015:119).

Peristiwa bakar diri pemuda Tunisia pada Desember 2010 dianggap sebagai momentum pemicu *Arab Spring* yang kemudian tersebar ke Negara-negara Kawasan Arab lainnya. Kurang dari satu tahun, aksi protes besar-besaran ini mampu membawa hasil pada beberapa Negara yang terkena Arab spring, terkhusus di Tunisia. Pemantik *Arab Spring* yang dilakukan oleh pemuda Tunisia bernama Mohammed Boauzizi. Penyebab khusus aksi bakar diri Boauzizi karena adanya rasa frustrasi akan kesejahteraan ekonomi yang dialami pemuda tersebut, yang kemudian tidak mendapat perlakuan dan respon yang seharusnya dari pemerintah daerah tempat pemuda tersebut tinggal. Aksi bakar diri Bouazizi berhasil membuahkan hasil yakni berakhirnya pemerintahan Rezim Ben Ali di Tunisia. Rezim yang dipimpin oleh Presiden Ben Ali, yang sudah memimpin Tunisia dengan cara yang otoriter selama kurang lebih 23 tahun.

Tergulingnya Rezim Ben Ali kemudian memperkenalkan arah politik yang baru di Tunisia. Tunisia dituntut untuk membawa keberhasilan revolusi jasmine menjadi lebih jelas, yaitu mengupayakan negara yang demokrasiya matang. Sejarah Negara Tunisia sejak berhasil meraih kemerdekaan dari Perancis, merupakan Negara dengan ideologi sekuler yang berada dibawah pemerintahan otoriter, disamping adanya pengaruh keberadaan agama mayoritas disana, yaitu agama Islam (Shults, 2014:7).

Dalam politik Internasional dan perdebatan ilmiah terkait *Arab Spring*, kasus Tunisia dilihat merupakan kasus yang khusus dan unik, melihat banyaknya tantangan demokratisasi di kawasan Arab yang lekat dengan sistem monarki dan pemimpin yang otoriter, dan kondisi Internal Tunisia sendiri seperti yang telah dijelaskan tadi (Shults, 2014:7), namun Tunisia berhasil menjadi satu-satunya Negara arab yang mengupayakan konsolidasi demokrasi yang komperensif sampai saat ini. Sehingga untuk bisa mencapai negara yang demokrasi tersebut, tentu terdapat faktor-faktor utama yang mendorong berjalannya proses konsolidasi demokrasi di Tunisia. Berdasarkan pendahuluan yang telah dijabarkan tadi, maka penulis melihat perlu menganalisis faktor-faktor utama yang mendukung konsolidasi demokrasi di Tunisia pasca Arab Spring (2011-2014).

Dalam tulisan ini, penulis akan menjelaskan tentang 2 unit yang akan memudahkan penulis dalam menjabarkannya sebelum lebih jauh membahas kerangka berfikirnya. Penulis menetapkan tingkat analisa Negara-bangsa dengan Tunisia sebagai fokus penelitian yang bertindak secara keseluruhan. Terdapat dua unit penelitian untuk mempermudah penulis dalam menjelaskan. Unit analisisnya adalah Upaya Tunisia dalam mengkonsolidasi Negara demokrasi, dan unit eksplanasi yaitu terkait Tunisia pada pasca *Arab Spring*.

Fokus penelitian ini untuk melihat faktor yang mendukung upaya Tunisia dalam mengonsolidasi sistem demokrasi pasca pecahnya *Arab Spring*. Penulis mencoba untuk mengutip teori atau pendekatan para ahli yang ada hubungannya dengan objek yang diteliti dan disimpulkan pada kerangka pemikiran yang mana tindakan ini dimaksudkan untuk memberi pondasi teoritis yang pada akhirnya akan dapat membantu dalam menjawab rumusan masalah diatas dalam sebuah kerangka pemikiran. Sehingga penulis mengambil beberapa pendapat yang dapat disajikan sebagai panduan dan acuan dalam menyusun skripsi ini. Konsep-konsep tersebut, yaitu:

1. Liberalisme dalam Demokrasi

Liberalisme merupakan Paradigma Hubungan Internasional yang diperkenalkan oleh budaya Barat. Liberalisme adalah puncak perkembangan masyarakat Barat yang menghasilkan rasa akan pentingnya individualitas manusia, pembebasan individu dari kepatuhan penuh terhadap kelompok, dan relaksasi dari ketatnya kebiasaan, hukum, dan otoritas. Dalam hal ini, liberalisme mewakili emansipasi individu didalamnya (Brittanica, 2014). John Locke pemikir lahirnya teori Liberalisme menerbitkan buku berjudul *Second Treatise of Government* pada tahun 1690. Di dalamnya, dia berpendapat bahwa satu-satunya peran pemerintah adalah melindungi hak alamiah msyarakat, yaitu hak untuk "Hidup, Bebas, dan tinggal" Seperti pemikir libertarian awal lainnya, dia berpendapat bahwa hak alamiah ini menggantikan hak buatan manusia, dan bahwa tidak ada penguasa atau pemerintah yang dapat menghapus hak-hak yang "tidak dapat dicabut". John Locke (1632 - 1704) juga mengemukakan filosofi liberalisme.

Terkait Demokrasi, dalam buku "*Liberalism and Democracy: Can't Have One without the Other*" karya Marc F. Plattner memberikan statement bahwa faktanya Liberalisme dan Demokrasi adalah dua konsep yang tidak bisa dipisahkan. Dalam bukunya menjelaskan bahwa hakikat kebebasan rakyat bernegegara bukan hanya terkait sistem multipartai dan pemilihan umum, namun mereka juga menginginkan tempat yang memiliki aturan hukum dan perlindungan kebebasan individu didalamnya. Sehingga dalam bukunya, Plattner menekankan tentang keberadaan *Liberal Democracies* (Plattner, 1998).

2. Kultur Politik

Budaya/Kultur politik dalam suatu masyarakat dipengaruhi antara lain oleh sejarah perkembangan dari sistem, oleh agama yang terdapat dalam masyarakat, kesukuan, status sosial, konsep mengenai kekuasaan, kepemimpinan. Menurut Gilbert Abcarian dan George S. Masannat, pada umumnya terdapat empat variabel dalam sistem politik. Yang pertama adalah kekuasaan, sementara, yang kedua adalah kepentingan. Variabel ketiga adalah kebijakan. Variabel terakhir adalah budaya politik, orientasi subjektif dari individu terhadap sistem politik. Jadi, budaya/kultur politik merupakan salah satu variabel dari sistem politik (Abcarian, 1970: 11).

Berdasarkan pemaparan diatas, hadirnya sebuah ideologi yang menjadi sistem dalam politik Negara, bisa saja diawali dengan kehadiran budaya politiknya terlebih dahulu. Demikian juga dengan sistem sekulerisme dalam sebuah Negara, kemungkinan didukung dengan hadirnya budaya sekuler lebih dahulu, dan kemudian mempengaruhi sistemnya.

3. Sekulerisme Pasif

Prinsip Ideal dalam sebuah Negara sekuler menurut Adrien Katherine Wing (2006) adalah, "Dalam pemerintahan sekuler, partai politik yang ada seharusnya tidak memiliki ikatan agama. Teks agama tidak boleh ada mempengaruhi undang-undang. Pendidikan dan agama harus terpisah. Negara sekuler tidak boleh menunjukkan rasa hormat kepada kelompok agama tertentu; oleh karena itu, negara berkonstitusi sekuler seharusnya tidak memiliki agama negara (Shults, 2014:8).

Namun kemudian dalam perkembangannya, Ahmet. T Kuru melihat bahwa ada Negara yang memiliki sistem sekuler, namun tidak secara keseluruhan memperlihatkan garis pemisah yang tegas antara pemerintahan negara dengan agama. Kuru menjelaskan kembali bahwa bentuk Sekulerisme tidak secara umum sama dalam setiap Negara. Melihat fakta tersebut, Ahmet T. Kuru kemudian membagi klasifikasi ideologi sekuler dalam 2 jenis (T.Kuru, 2012), yakni:

- *Assertive Secularism, The state plays an assertive role to exclude religion from the public sphere.*
- *Passive Secularism, The state plays a passive role and allows public visibility of religion.*

Inti perbedaan utama dari 2 jenis perspektif ini berputar dalam bagaimana suatu Negara memandang positif atau negatife perbedaan yang ada antara agama dan Negara. Melihat respon tiap negara terhadap pandangan "*Public Visibily in Public*" (T. Kuru, 2009)

4. Konsep Konsolidasi Demokrasi

Demokrasi merupakan satu kesatuan atau perangkat sistem pemerintahan yang berisi dan meliputi kebebasan individu, pembagian kekuasaan, partisipasi, pemilihan umum, multipartai, kompetisi yang sehat dan adil, kompromi yang terjamin, penegakan hukum yang adil dan jujur, kebebasan bagi media massa, dan adanya transparansi serta pertanggungjawaban dari pemerintah. Semua perangkat yang di jabarkan tersebut merupakan suatu bentuk pengakuan terhadap poin penting dari demokrasi, yakni terwujudnya keseimbangan hak dan kepentingan antara individu, masyarakat, dan negara (Alkatiri, 2007).

Samuel Huntington dalam studinya tentang "gelombang demokratisasi ketiga". Dia memaparkan bahwa demokratisasi pada tingkatan yang paling sederhana mensyaratkan tiga hal (Huntington, 1995): (1) Berakhimya rezim otoriter ; (2) Dibangunnya sebuah rezim demokratis ; (3) Pengkonsolidasian rezim demokratis itu.

"That democratic consolidation cannot set in before a democratic transition has been successfully completed." Dapat di pahami bahwa Konsolidasi demokrasi merupakan tahap lanjutan dari sebuah transisi demokrasi pada suatu Negara, atau Konsolidasi demokrasi merupakan tahapan akhir dari proses demokratisasi sebuah Negara, yang sudah melewati fase transisi demokrasi terlebih dahulu. "Kebanyakan literatur studi mendefinisikan Konsolidasi Demokrasi adalah artinya menjauhi kemungkinan ancaman demokrasi, atau untuk mendukung bergerak ke tingkat demokrasi yang lebih mapan. Konsolidasi dmeokrasi itu dimaksudkan sebagai demokrasi yang tahan krisis dan berkualitas tinggi (Schadler, 1997).

Pembahasan

Faktor Pecahnya Arab Spring

Pecahnya Arab Spring dalam pembahasan penulis, dipicu oleh 2 klasifikasi faktor. Klasifikasi tersebut yaitu faktor struktural, dan faktor spontan. Faktor struktural merupakan kondisi atau

keadaan yang menjadi penyulut pemberontakan, dan sudah berjalan cukup lama, sehingga masuk dalam status kejenuhan dan siap meledak. Sedangkan faktor spontan, adalah faktor yang memantik, mematangkan faktor struktural itu, sehingga *Arab Spring* tidak terbandung lagi. Faktor spontan kemudian yang bertindak sebagai katalisator yang memicu pemberontakan di tempat itu adalah pembakaran diri Mohammed Bouazizi di Tunisia, penyiksaan Khaled Said di Mesir, dan penangkapan aktivis politik Fathi Terbel di Libya (Salih, 2013:188).

Faktor struktural pecahnya *Arab Spring* yang terjadi di kawasan Arab dijelaskan dalam tiga poin, yang pertama yaitu rezim otoriter yang terlalu lama menguasai pemerintahan. Mayoritas Negara-negara Arab memilih Monarki sebagai bentuk negaranya, dan beberapa ada yang berbentuk Republik. Meskipun demikian, pemerintahan disana Monarki ataupun Republik tetap berjalan dengan kecenderungan pemerintahan otoriter. Itu terlihat dari rata-rata lama waktu menjabat para pemimpin, baik Raja ataupun Republik adalah 22 tahun (Aissa, 2012:4). Lalu kedua, adanya tuntutan perbaikan ekonomi oleh rakyat. Kemiskinan yang dirasakan masyarakat, karena tidak adanya dukungan dari pemerintah untuk kesejahteraan masyarakatnya, lapangan pekerjaan yang sulit didapatkan, namun dibarengi dengan fakta semakin kayanya pemerintah (Musaddad, 2013:14).

Yang ketiga, pelanggaran HAM yang dilakukan rezim lama. Rezim-rezim Arab ini umumnya menggunakan keadaan darurat dan undang-undang yang menyatakan bahwa mereka memerangi terorisme, dengan tujuan membenarkan kejahatan besar terhadap warganya sendiri yang mengancam kekuasaan, termasuk dengan aksi penculikan, penghilangan paksa, penangkapan yang tidak beralasan, penyiksaan dan pelanggaran hukum, dan bahkan pembunuhan yang tidak sah (Salih, 2013:188).

Pra Arab Spring di Tunisia

Tunisia sebagai negara pertama dimana peristiwa pecahnya Arab Spring, tentu menjadi negara yang juga merasakan kondisi-kondisi yang memicu *Arab Spring*. Peristiwa yang pecah pada bulan Desember 2010 tersebut menjadi bukti adanya tuntutan besar dari rakyat Tunisia. Tunisia sudah sejak pasca kolonialisme merasakan pemerintahan yang otoriter, yaitu di era kepemimpinan Habib Bourguiba. Pasca pemerintahan Bourguiba, Setelah berhasil mengambil kursi pemerintahan Bourguiba dengan menawarkan nilai demokrasi sebagai slogan. Ben Ali kerap menekankan sifat pemerintahannya adalah pemerintahan sekuler yang berdemokrasi dan tidak memusuhi Islam, dan dapat melakukan rekonsiliasi hubungan dimasa depan (Logan, 2012:25). Ben Ali memanipulasi keberadaan agama Islam, dengan menghadirkan nilai Islam yang sebelumnya dimusuhi Negara, untuk mengumpulkan dukungan publik kepada rezim barunya (Shahin, 2006:19). Kemenangan Ben Ali saat itu menunjukkan bagaimana masyarakat Tunisia sejak lama menginginkan pemerintahan yang lebih demokrasi, dan lebih lunak terhadap agama.

Namun Ben Ali hanya menerapkan pemerintahan berdemokrasi hanya untuk menjalankan strategi. Pada tahun ke-dua Ben Ali kembali menjalankan pemerintahan seperti yang dijalankan Bourguiba, yaitu sistem otoriter dan sistem yang cenderung asertif terhadap agama (Ghafur, 2014:92). Dan kemudian Arab Spring menjadi kesempatan untuk Tunisia bisa merasakan demokrasi yang sesungguhnya.

Bentuk Konsolidasi Demokrasi di Tunisia

Konsolidasi demokrasi yang diupayakan di Tunisia dimulai dari masuknya aktor-aktor baru yang sebelumnya menjadi pihak oposisi di rezim Ben Ali. Partai-partai yang kemudian muncul dalam pergolakan masuknya demokrasi di Tunisia adalah partai Islam seperti partai Ennahda. Partai yang terbentuk pada 1981, sebagai Pergerakan Islam yang terinspirasi oleh "Muslim Brotherhood". Ennahda atau dalam bahasa Arab yaitu *Hizb al-Nahdah* yang berarti "Renaissance". Partai tersebut secara resmi dilarang sebagai partai di Tunisia oleh rezim Ben Ali pada tahun 1992, namun merupakan partai pertama setelah revolusi yang diterima akreditasinya pada Maret 2011 (Schäfer, 2014:13). Partai yang beraliran Islam moderat dipimpin oleh Rashid Ghannouchi, seorang aktivis yang dipenjara pada era Bourguiba karena aktivitas politiknya yang berbenturan dengan ideologi sekuler Tunisia dulu. Partai ini memiliki daya tarik dari masyarakat karena tentu merupakan partai oposisi pemerintah resmi, yang kala itu menjadi musuh masyarakat. Ideologi yang juga dibawa bersamaan dengan daya tarik Ennahda tadi, yaitu ideologi yang bertolak belakang dengan pemerintahan Ben Ali, ideologi yang lebih ramah dengan perkembangan agama dalam ruang publik (Baker, 2015:40).

Lalu ada partai Republik, CPR atau *Congress for the Republic*, Partai sekuler seperti partai *The Mouvement du peuple (People's Movement)*. Kemudian, Partai Ettakol (*Democratic Forum for Labour and Liberties*), lalu Partai *Afek Tounes* (Aspirasi Tunisia), partai *Al Massar* (Suara Demokrat dan Sosial), Partai Pekerja Tunisia (PTT) dan independen dari bekas Kutub Demokratik Modernis (PDM). Lalu ada partai UPL, dan muncul beberapa partai oposisi lain, namun kurang berhasil menarik dukungan (Schäfer, 2014: 15-17).

Setelah melewati banyak gejolak dan masa persiapan pemilu pertama pasca *Arab Spring*, akhirnya pemilihan umum pertama pasca *Arab Spring* berlangsung pada 23 Oktober 2011. Dengan tingkat partisipasi 86 % untuk pemilih sukarela dan tingkat partisipasi 16 % untuk pemilih yang terdaftar secara otomatis (The Carter Center, 2011:5). Hasil akhir yang di keluarkan oleh ISIE menunjukkan dari 8,2 juta pemilih yang berhak memilih, tingkat partisipasi tercatat sebanyak 52%. Dengan jumlah 4.123.602 yang terdaftar untuk memilih, hanya 3.702.627 yang benar-benar memberikan suara pada tanggal 23 Oktober. Dari total 217 kursi parlemen yang dibutuhkan di Tunisia, hasil pemilihan terhitung 41% hasil suara dimenangkan oleh partai Ennahda, dengan 89 kursi parlemen dari 217 yang berhasil diduduki (The Carter Center, 2011:54).

Nilai-nilai demokrasi yang semakin terlihat dalam pemerintahan pasca revolusi yaitu, adanya partisipasi dari kaum wanita dalam parlemen partai politik, menjadi bukti tercapainya keadilan untuk hak-hak wanita di Tunisia yang sebelumnya tidak terlalu terlihat. Rakyat Tunisia memilih 59 kandidat wanita dalam pemilihan, dengan presentase 27% dari total kandidat.

Selain itu, terdapat beberapa kebijakan pemerintahan Ennahda terkait wanita, yaitu :

1. Negara berkomitmen untuk melindungi hak-hak wanita untuk mengeluarkan aspirasi, hak untuk mendapatkan pekerjaan, bekerja lalu dibayar seharusnya.
2. Perubahan "Hukum Keluarga" di Tunisia, yang dalam prosesnya banyak mendapatkan masukan dari pihak feminis dan kelompok politik sekuler. Dengan tetap dipertahankannya larangan poligami di Tunisia. Negara harus mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk memberantas kekerasan terhadap perempuan.

3. Disahkan Undang-undang paritas gender pada bulan Mei 2011. Isinya mewajibkan separuh dari seluruh kandidat partai dalam pemilihan nasional adalah perempuan. Bahkan susunan parlemen di Tunisia saat ini 31% diisi oleh perempuan.
4. Sampai pada tahun 2014, Kementerian Perempuan, Keluarga, dan Anak-anak memperkenalkan undang-undang yang melindungi perempuan dari kekerasan rumah tangga, dan pelecehan seksual. RUU tersebut didukung penuh oleh pemerintahan koalisi Ennahda. (Baker, 2015:59).

Setelah memenangkan mayoritas suara dalam pemilihan parlemen tahun 2011, Partai Ennahda mulai menjalankan strategi pemerintahannya. Strategi untuk merealisasikan negara demokrasi di Tunisia. Dalam kurun waktu sebulan, Partai Ennahda bernegosiasi untuk melakukan koalisi dalam pemerintahan. Pada bulan Desember 2011, dibentuk pemerintahan Troika yang diisi oleh 3 partai, yaitu partai terpilih, Partai Ennahda, *Congrès pour la République* (CPR), dan partai Ettakol. Ennahda membangun koalisi, susunan koalisi yang dibentuk dalam pemerintahan adalah, Moncef Marzouki dari Partai CPR menjadi Presiden; Mustafa Ben Jafar dari partai Ettakol menjadi Ketua Badan Legislatif; dan Presiden Marzouki secara resmi menunjuk Hamadi Jebali dari partai Ennahda sebagai Perdana Menteri pada tanggal 24 Desember 2011, sebagian besar kementerian utama diberikan kepada anggota Ennahda (Schäfer, 2014:20). Ennahda melihat bahwa peranan tokoh-tokoh dari partai lain adalah penting dan dapat membawa perubahan yang baik dalam pemerintahan (Ghafur, 2014: 89).

Pasca Pemilu, Majelis Konstituante Nasional mulai menyusun draf konstitusi yang baru. Salah satu poin yang diusulkan dalam konstitusi baru adalah pemberlakuan syariat Islam di Tunisia. Ghannouchi pernah memberikan statement, "Kami menganggap bahwa sebuah negara akan lebih islamis ketika lebih menekankan keadilan didalamnya." (Irrfront, 2016). Ennahda yang berupaya menghadirkan keadilan dalam memeluk agama terlihat dari beberapa kebijakan, aksi, atau kegiatan publik yang dibuat dalam pemerintahan saat ini, yaitu:

1. Tidak ada batasan atau pelarangan penggunaan Masjid, selama digunakan sesuai fungsinya.
2. Aktor-aktor di Ennahda tidak semua mengakui bahwa landasan ideology mereka sama secara keseluruhan dengan *Muslim Brotherhood* (Irrfront, 2016) Seperti diketahui, *Muslim Brotherhood* diketahui adalah komunitas yang berideologikan islamis. Ghannouchi membandingkan pergerakan Ennahda tidak bisa disamakan dengan pergerakan di Taliban, ataupun Iran. Ideologi partai AKP Turki dikatakan terdekat dengan ideologi partai Ennahda. Dan partai AKP adalah partai Islam yang tidak radikal, partai Islam yang menjunjung tinggi nilai keadilan didalamnya (Ounissi, 2016:4)
3. Dicabutnya larangan penggunaan Jilbab didepan umum tahun 1957 oleh wanita Tunisia. Partai tersebut juga tetap menjaga nilai pluralitasnya, dengan tidak membuat peraturan yang mewajibkan pemakaian jilbab. Semua tergantung keinginan individu masing-masing. (Katsipis, 2017:3)
4. Khotbah Umum di Masjid yang sering dilakukan oleh pemuka Partai Ennahda. Dimana sebelumnya menjadi larangan keras oleh rezim sebelumnya.

Analisis Faktor-Faktor Utama Konsolidasi Demokrasi di Tunisia

Keberhasilan Tunisia mengiring demokratisasi di negaranya, membawa Tunisia untuk masuk dalam tahapan selanjutnya, yakni tahap mengonsolidasi sistem demokrasi tersebut. Peristiwa Arab Spring di Tunisia telah membuka lembar demokrasi disana. Demokrasi kemudian menjadi implementasi nilai liberalisme dalam kehidupan bernegara. Demokrasi menjadi landasan tercapainya hak-hak masyarakat dalam hidup bernegara. Penulis melihat dalam kasus Tunisia, Liberalisme yang mejadi salah satu paradigma dalam Hubungan Internasional ini menjadi penting, karena melihat adanya keterikatan Demokrasi dengan Liberalisme itu sendiri. Demokrasi di Tunisia sendiri sebagai wujud adanya implementasi dari hak-hak individu yang diperjuangkan. Hak untuk hidup, hak dasar untuk bebas, dan hak untuk tinggal. Dalam konteks Tunisia, demokrasi yang diperjuangkan adalah hak-hak rakyat yang sudah lama diambil oleh pemerintah Tunisia. Mulai dari hak untuk memilih pemimpin, hak untuk mengeluarkan pendapat, terlebih pendapat yang mengkritik pemerintahan. Hak untuk beragama, hak kesetaraan antara wanita dan pria yang pada hakikatnya, pria dan wanita adalah sama. Sebagaimana konsep Liberalisme yang dikatakan oleh John Locke (Pirie, 2010).

Tantangan Tunisia dalam mengonsolidasi demokrasi ialah Tunisia yang sejak merdeka merupakan negara dengan pemerintahan yang sekuler. Kecenderungan sekuler yang menekan (asertif), sedangkan Tunisia sendiri merupakan negara dengan mayoritas 98% nya beragama muslim. Selain itu, budaya otoriter yang sudah cukup lama berakar di Tunisia. Hegemoni Perancis di Tunisia yang juga mengambil bagian dalam upaya kemerdekaan Tunisia, tentu secara tidak langsung mempengaruhi sistem politiknya. Selama kurang lebih 50 tahun menjadi Negara koloni Tunisia, Kultur/Budaya Sekuler yang menjadi ideologi dalam sistem politik yang dimiliki Perancis secara perlahan mempengaruhi budaya politik di Tunisia. Sekulerisme (*Secularism or laïcité*) di deklarasikan dengan jelas diperundang-undangan 9 Desember 1905 menyatakan bahwa Perancis adalah Negara sekuler (Liogier, 2009).

Melihat adanya faktor historis dan faktor masyarakat, Tunisia dalam upaya mengonsolidasi nilai demokrasi di Negaranya, membutuhkan sebuah konsep baru yang menjadi penengah dalam kondisi disana. Meskipun dalam pemahaman yang mungkin bisa diambil adalah Sekulerisme di Tunisia ini sendiri secara tidak langsung menjaga Tunisia yang pasca revolusi dipimpin oleh partai Islam. Kehadiran aktor baru demokrasi di Tunisia menjadi gerbang yang membuka terealisasinya nilai demokrasi disana. Kehadiran partai Ennahda dengan ideologi anti rezim otoriter menjadi harapan ditengah tuntutan rakyat Tunisia. "Visi kita tentang Islam adalah sesuatu yang moderat. Sejak tahun 1981 kita telah menyatakan bahwa kita menerima demokrasi tanpa batasan dan kita menerima keputusan rakyat apakah mereka datang bersama kita atau melawan kita. Kami menerima gagasan kewarganegaraan sebagai dasar hak, jadi semua warga negara setara baik mereka Islamis maupun bukan Islamis." –Rachid al-Ghannouchi (Encyclopædia Britannica, 2015).

Setelah memenangkan mayoritas suara dalam Pemilu 2011, Ghannouchi sebagai ketua partai memberikan statementnya pertama kali, yaitu: "Kami akan meneruskan Revolusi ini untuk mewujudkan Tunisia yang bebas, mandiri, berkembang, dan sejahtera dan makmur dengan mengakui hak-hak Tuhan, para pemuka agama, wanita, pria, yang beragama ataupun yang tidak, akan terjamin semua, karena Tunisia adalah untuk semua." (Al Jazeera, 2011). Ideologi demokrasi dipegang teguh oleh pemerintah pasca Arab Spring yang dinilai menjadi pendukung berhasilnya Tunisia mengiring demokrasi ditengah kegagalan negara Arab lain masih terus berkonflik.

Ennahda melihat bahwa salah satu syarat negara demokrasi adalah kebebasan masyarakat dalam berekspresi, salah satunya mengekspresikan kepercayaannya terhadap suatu agama. Sekulerisme didefinisikan sebagai konsep yang memisahkan keberadaan agama dengan Negara berikut dengan sistemnya. Pergeseran tipe sekulerisme dari pasca kolonial yang cenderung sekuler menjadi lebih ramah dengan agama juga tak lepas dari dampak pemerintahan presiden Ben Ali sebagai presiden yang otoriter, karena hal itu isu demokrasi yang menjadi cita-cita masyarakat di Tunisia seakan diwujudkan melalui partai Ennahda.

Pecahnya Arab Spring di kawasan Arab, menjadi awal yang menunjukkan nilai demokrasi di Tunisia. Prinsip Ideal sebuah Negara sekuler dalam perkembangan pasca Arab Spring tetap dipegang oleh Tunisia, dimana agama tidak menguasai pemerintahan dan kebijakan yang diambil, dan paham sekuler yang masih mewujud dalam pengadilan dan parlemen mereka. Namun perihal pendekatannya terhadap agama, terlihat berubah. Pemerintah Tunisia mulai memberikan ruang kepada masyarakatnya untuk mengekspresikan keyakinan beragamanya, dan mengakomodasi agama untuk berkembang (Shults, 2014:8).

Sekulerisme Pasif menurut definisinya merupakan ideologi sekuler dimana Negara mengakomodasi hadirnya agama di ruang publik. Bersahabat dengan adanya perkembangan agama di publik. Sekulerisme Pasif ala Tunisia menjadi jawaban dari tuntutan pihak masyarakat dan kultur pemerintahan yang cenderung sekuler, namun tengah mengupayakan demokrasi (Kuru, 2012). Sekulerisme pasif merupakan upaya dari rezim baru pasca Arab Spring di Tunisia dalam mengkonsolidasi nilai demokrasi disana. Masuknya aktor-aktor politik baru menjadi jalan keluar dari tuntutan Arab Spring di kawasan Tunisia. Partai Islam Moderat Ennahda menawarkan sistem Negara demokrasi dengan tidak mematkan paham agama dalam masyarakat. Seperti dalam beberapa bukti yang memperlihatkan kecenderungan sekulerisme pasif yang dihadirkan Ennahda dalam masa pemerintahannya, yakni:

1. Souad Abdelrahim, seorang kandidat dalam parlemen yang tidak memakai jilbab, telah ditawarkan sebagai simbol toleransi partai Ennahda (BBC News, 2011).
2. Koalisi yang dilakukan partai Ennahda bersifat luas. Luas yang dimaksud, tidak berkoalisi dengan partai yang berideologi sama dengan Ennahda. (CPR & Ettakol adalah partai sekuler)
3. Statement Ghannouchi di Aljazeera : "Kami menentang pengenaan jilbab atas nama Islam dan kami menentang pelarangan pengenaan jilbab atas nama sekularisme atau modernitas" (Al Jazeera, 2011). Statement itu menegaskan dimana posisi partai Ennahda berada. Yakni tidak menjadi partai islamis, tapi juga tidak menjadi partai sekuler yang represif.
4. Adanya dinamika perubahan kebijakan "Hukum Keluarga" di Tunisia. Dimana isinya bertujuan untuk menunjukkan jarak yang tegas antara ideologi partai Ennahda dengan Salafis kelompok politik Islam (Katsipis, 2017:3)
5. Melihat Ennahda sebagai partai yang berhasil memenangkan pemilu pasca revolusi, Ennahda pastilah memiliki nilai-nilai yang baik dan menarik untuk masyarakat Tunisia. Berikut akan dibahas nilai-nilai demokrasi yang diupayakan partai Ennahda, yang dahulu merupakan faktor pecahnya Arab Spring di Tunisia.
6. Ennahda mengambil posisi yang sangat pragmatis mengenai pariwisata, menolak anggapan bahwa beberapa praktik pariwisata harus dilarang karena bertentangan dengan syariah. Hamadi Jabeli, mengatakan bahwa pariwisata terlalu strategis untuk dibatasi. (Saif, 2012:7)

*Analisis Faktor-Faktor Utama dalam Konsolidasi Demokrasi di Tunisia
Pasca Arab Spring (2011-2014)*

Penjabaran di atas menjadi analisis faktor yang mendukung Tunisia dalam menghadirkan kebijakan-kebijakan yang demokrasi pasca revolusi. Kebijakan-kebijakan dengan standart demokrasi yang berhasil dibuat, didukung oleh ideologi kuat yang dipegang oleh partai Ennahda, ideologi liberal dalam konsep demokrasi yang dihadirkan. Sekulerisme pasif yang dihadirkan Ennahda di Tunisia menjadi faktor utama hadirnya kebijakan baru di Tunisia yang sifatnya lebih ramah dengan perkembangan agama. Islamisme yang secara teori tidak mampu berjalan seiringan dengan kondisi demokrasi di Tunisia, yang tak bisa lepas dari konsep sekulerisme. Secara ideologis, sulit menjembatani hukum agama (syariah) dengan paham demokrasi yang mengusung kedaulatan rakyat. Namun Tunisia tetap mengupayakannya, karena didukung oleh kehadiran aktor-aktor Islam moderat yang optimis akan demokrasi (Al Jazeera, 2015).

Kesimpulan

Revolusi memang memberikan harapan baru di Tunisia, tetapi tak bisa dipungkiri dinamika pengonsolidasian demokrasi di Tunisia pada faktanya masih terus berjalan. Meskipun dalam beberapa hal yang telah dibahas sebelumnya, Tunisia sudah berhasil menghadirkan nilai-nilai demokrasi. Tren demokrasi pun semakin nyata, melihat semakin terbukanya peluang sipil dan non sipil memberi aspirasi. Rakyat Tunisia semakin menunjukkan hasrat demokrasi, transparansi, dan perkembangan ekonomi (Katsipis, 2017: 5).

Kemenangan partai Islam Ennahda di Tunisia tahun 2011 menjadi awal yang menghantar Tunisia menuju negara Demokrasi, dengan berbagai upayanya. Demokrasi yang diperjuangkan Tunisia selama ini merupakan sebuah sistem yang memerlukan 'biaya' besar dalam pembangunannya. Membangun karakteristik demokrasi dengan adanya pemisahan kekuasaan, pemilu yang bebas, kebebasan warga sipil, hukum, penghargaan atas hak asasi manusia seperti kepemilikan pribadi, kebebasan berpendapat, serta toleransi beragama, membutuhkan waktu yang tidak sebentar.

Begitupun dengan Tunisia, Negara yang sudah berpuluh-puluh tahun berada dalam rezim yang cenderung otoriter, dengan sistem negara sekulerisme bersifat asertif. *Arab Spring* yang diupayakan oleh kelompok masyarakat kemudian menjadi awal dari perjalanan Tunisia mengiring pengonsolidasian demokrasi. Terlepas dari upaya kelompok masyarakat, upaya mentransfer kekuasaan dari elit pemimpin lama ke penggantinya, sangat terbuka oleh ancaman gangguan, seperti yang terlihat di Tunisia. Partai Ennahda yang mengalami tuntutan untuk turun tahta, namun mengambil putusan yang mengedepankan kesatuan Tunisia dengan melangkah mundur demi demokrasi di Tunisia. Menurunkan rezim diktator adalah hal yang sederhana, namun memerangi sistem politik yang korup, penuh dengan nepotisme dan patronase merupakan tantangan yang lebih besar. Diperlukan bertahun-tahun sebelum aktor pemerintah dapat menjadi satu-satunya aktor yang dilegitimasi. Sebelum itu, dipastikan masyarakat sipil masih menjadi pengawas sekaligus juri yang menilai kinerja pemerintah.

Referensi

Abdo-Katsipis, Carla B. (2017). "Islamists in Power and Women's Rights: The Case of Tunisia". United States: Crown Center for The Middle East Studies. <https://www.brandeis.edu/crown/publications/meb/MEB112.pdf> diakses pada 9 November 2017.

- Aljazeera. (2011, 28 Oktober). "Ennahda wins Tunisia's elections". <http://www.aljazeera.com/news/africa/2011/10/2011102721287933474.html> diakses pada 30 November 2017.
- Aljazeera. (2011, 27 Oktober). "Who are Tunisia's political parties?". <http://www.aljazeera.com/indepth/features/2011/10/201110614579390256.html> diakses 30 November 2017.
- Aljazeera. (2014, 27 Maret). "Revealing Tunisia's corruption under Ben Ali" <http://www.aljazeera.com/indepth/features/2014/03/revealing-tunisia-corruption-under-ben-ali-201432785825560542.html> diakses pada 1 November 2017.
- Awaludin, Hamid. (2012). "HAM, Politik, Hukum, & Kemunafikan Internasional". Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.
- Baker, Veronica. (2015). "The Role of Civil Society in the Tunisian Democratic Transition". Boulder: Undergraduate Honors Theses. https://scholar.colorado.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2212&context=honr_theses diakses pada 27 November 2017.
- BBC News.(2011, 25 Oktober). "Profile: Tunisia's Ennahda Party". <http://www.bbc.com/news/world-africa-15442859> diakses pada 22 November 2017
- BBC News. (2013, 25 Juli). "Tunisian politician Mohamed Brahmi assassinated". <http://www.bbc.com/news/world-africa-23452979> diakses pada 10 Desember 2017.
- Center for the Study of Islam and Democracy. (2015). "Rached Ghannouchi Lecture on National Dialogue Remarks". <https://www.youtube.com/watch?v=fIE0gJuf18w> diunduh pada 24 Desember 2017.
- Chamki, Tarek. (2013). "Neo-Islamism Post Arab Spring". Australian Political Studies Association: Murdoch University. https://www.auspsa.org.au/sites/default/files/neo_islamism_post_arab_spring_tarek_c_hamkhi.pdf diakses pada 15 Oktober 2017.
- El Hassane Aissa, Lieutenant Colonel. (2012). "The Arab Spring: Causes, Consequences, and Implications". United States: United States Army War College Class of 2012. <https://pdfs.semanticscholar.org/b596/920c72028efc1ee888fc41f37669cb3402ee.pdf> diakses pada 4 Oktober 2017.
- Encyclopædia Britannica. (2015, 30 November). "Rachid Al-Ghannouchi Tunisian Political Activist". <https://www.britannica.com/biography/Rachid-al-Ghannouchi> diakses pada 30 November 2017.
- Fanani, Ahmad. (2016). "Rivalitas Arab Saudi-Iran Di Yaman Era Arab Spring 2010-2016". Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. <http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/6109/k.%20Naskah%20Publikasi.pdf?sequence=1&isAllowed=y> diakses pada 9 November 2017.
- Ghafur, Muhammad Fakhry. (2014). "Religion and Democracy: The Emergence of The Power Of Political Islam In Tunisia, Egypt And Libya". Jakarta: LIPI. <http://Ejournal.Politik.Lipi.Go.Id/Index.Php/Jpp/Article/Viewfile/203/87> diakses Pada 9 November 2017.
- Ghafur, Muhammad Fakhry. (2012). "Demokratisasi Dan Fenomena Kebangkitan Politik Islam di Timur Tengah". Jakarta: LIPI <http://www.politik.lipi.go.id/kolom/kolom-2/timur-tengah/610-demokratisasi-dan-fenomena-kebangkitan-politik-islam-di-timur-tengah> diakses pada 28 November 2017.
- Hwang, Julie. (2015). *Peaceful Islamist Mobilization in the Muslim World: What Went Right*. New York: Palgrave Macmillan US. <https://books.google.co.id/books?isbn=0230100112>. Diunduh pada 1 Oktober 2017.
- Irfont. (2016, 20 Oktober). "Rachid al-Ghannouchi Sebagai Demokrat Islam". <https://irfont.net/post/articles/rachid-al-ghannouchi-sebagai-demokrat-islam/> diakses pada 7 Desember 2017.

*Analisis Faktor-Faktor Utama dalam Konsolidasi Demokrasi di Tunisia
Pasca Arab Spring (2011-2014)*

- Kuru, Ahmet T. (2012). "Islam, Secularism, and Democracy: Is There A Turkish Exceptionalism?", California: San Diego State University. <https://www.bc.edu/content/dam/files/centers/boisi/pdf/s12/Turkish%20Democracy%20-%20Panel%201%20%20-%20Ahmet%20T%20Kuru.pdf> diakses pada 9 Oktober 2017.
- Logan, Tyler Pentland. (2012). "When Authoritarianism Failed In Tunisia: An Investigation Of The Ben Ali Regime And The Factors That Led To Its Downfall". Washington: A Thesis of Arts and Sciences of Georgetown University. https://repository.library.georgetown.edu/bitstream/handle/10822/557507/Logan_georgetown_0076M_11838.pdf;sequence=1, diakses pada 23 Oktober 2017.
- Musaddad, Labib. (2013). "Arab Spring". Depok: Karya Ilmiah Non Seminar Universitas Indonesia. <http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20368972-MK-Labieb%20Musaddad.pdf> diakses pada 27 Oktober 2017.
- Ounissi, Sayida. (2016). "Ennahda from within: Islamists or "Muslim Democrats"?" United States: Project on US Relations With The Islamic World. <https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/07/Ounissi-RPI-Response-FINAL.pdf> diakses pada 9 Desember 2017.
- Pirie, Ian. (2010). "Political Philosophy Part 2". <http://imagining-other.net/pp13liberalismadamsmith.htm> diakses pada 14 Januari 2018.
- Ramadan, Tariq. (2012). *Islam And The Arab Awakening*, New York: Oxford University. <https://books.google.co.id/books?isbn=0199933731>. Diunduh pada 1 Oktober 2017.
- Saif, Ibrahim & Muhammad Abu Rumman. (2012). "The Economic Agenda of The Islamist Parties". Washington, DC: Carnegie Endowment for International Peace. <https://www.scribd.com/document/138099857/The-Economic-Agenda-of-the-Islamist-Parties> diakses pada 6 Desember 2017.
- Sahide, Ahmad.(2015). "The Arab Spring: Membaca Kronologi dan Faktor Penyebabnya". Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. <http://journal.umy.ac.id/index.php/jhi/article/view/2237> di diakses 2 Oktober 2017.
- Salih, Kemal Eldin Osman. (2013). "The Roots and Causes of The 2011 Arab Uprisings". Arab: Pluto Journals. http://www.pinxit.com/page101/page115/downloads-23/files/Arab_Spring_Causes.pdf diakses pada 16 Oktober 2017.
- Schäfer, Isabel. (2014). "The Tunisian Transition: Torn Between Democratic Consolidation and Neo-Conservatism in an Insecure Regional Context". Publication and coordination: European Institute of the Mediterranean. https://www.die-gdi.de/uploads/media/Tunisian_Transition_EuroMeSCo_Paper_25_Isabel_Schaefer.pdf di diakses 2 Oktober 2017.
- Shahin, Emad El Din.(2006). "Secularism Manipulating Islam: Politics and Religion in Tunisia". Seminar: God's Rule and Cesar's Rule: Exploring the Spaces between Theocracy and Secularism. <http://emadshahin.com/eshahin2/wp-content/uploads/2014/08/Secularism-Tunisia-Final.pdf> diakses pada 5 Oktober 2017.
- Shults, E.Mary. (2014). "Tunisia: Democracy and Islam in post-Arab Spring Politics". Departmental Honors Thesis: Political Science International and Comparative Studies. <http://scholar.utc.edu/honors-theses> diakses pada 4 Oktober 2017.
- Stepan, Alfred. (2012). "Tunisia's transition and the twin tolerations". Southeast Asia: National Endowment for Democracy and The Johns Hopkins University Press. <https://www.journalofdemocracy.org/sites/default/files/Stepan-23-2.pdf> diakses pada 20 Oktober 2017.
- The Carter Center. (2011). National Constituent Assembly Elections in Tunisia. Atlanta: Carter Center, hal.32, https://www.cartercenter.org/resources/pdfs/news/peace_publications/election_reports/tunisia-final-oct2011.pdf diakses pada 24 November 2017.